

Pengelolaan Keuangan yang Efektif dan Efisien dalam Meningkatkan Kekuatan Ekonomi bagi Masyarakat Papua dan Papua Barat di Indonesia

JAM
14, 4

Diterima, September 2016
Direvisi, Nopember 2016
Disetujui, Desember 2016

John Agustinus

Program Magister Sains Manajemen
PascaSarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay

Abstract: *Effective financial management is to run all of the financial system in accordance with an agreement in the programming. Public finance management at the local government level provinces of Papua and West Papua are built on the deliberations of local development plans by leveraging Government funds through the General Allocation Fund and Special Autonomy Fund. The use of local government finances governance efficiently and use the funds should be in accordance with the level of achievement of the implementation of the program, so that in implementing all the programs and the use of appropriate financial it will achieve an effective and efficient the financial management. This study uses a phenomenological study with Weber's perspective, the data obtained through interviews with the Head of Finance of Papua and West Papua. Besides depth interviews were also conducted Focus Group Discussion together financial experts as lecturers and NGOs. The results showed that the local government financial management is in compliance with the legislation and in the implementation of the program is also in accordance with the plan, it means that the financial management has been effective and efficient in accordance with the program and utilize the funds to the maximum.*

Keywords: *the effectiveness, efficiency, finance, autonomy*

Abstrak: Pengelolaan keuangan yang efektif adalah dengan menjalankan semua sistem keuangan sesuai dengan kesepakatan dalam penyusunan program di mana di dalam pengelolaan keuangan negara di tingkat pemerintahan daerah provinsi Papua dan Papua Barat dibangun dari musyawarah rencana pembangunan daerah dengan memanfaatkan dana pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus. Membangun tata kelola penggunaan keuangan pemerintah daerah dengan efisien dan menggunakan yang ada harus sesuai dengan tingkat pencapaian pelaksanaan program, sehingga dalam melaksanakan semua program dan penggunaan keuangan yang tepat maka akan tercapai pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Metode Penelitian Menggunakan kajian fenomenologi dengan perpektif Weber, peneliti mengkaji dengan prosedur wawancara bersama *key informan* antara lain Kepala Biro Keuangan Provinsi Papua dan Papua Barat. Selain wawancara mendalam juga dilakukan Focus Group Discussion bersama pakar keuangan baik dosen dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah daerah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dalam pelaksanaan program juga sesuai dengan perencanaan hal tersebut berarti bahwa pengelolaan keuangan telah efektif dan efisien sesuai dengan program dan memanfaatkan dana dengan maksimal.

Kata Kunci: efektifitas, efisiensi, keuangan, otonomi khusus



Jurnal Aplikasi
Manajemen (JAM)
Vol 14 No 4, 2016
Terindeks dalam
Google Scholar

Alamat Korespondensi:
John Agustinus, Program Ma-
gister Sains Manajemen Pas-
casarjana STIE Port Numbay,
DOI: <http://dx.doi.org/10.18202/jam23026332.14.4.13>

Manajemen adalah seperangkat kegiatan (termasuk perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, pengarahan/pengendalian) diarahkan kepada sumberdaya organisasi (manusia, finansial, peralatan fisik dan informasi) dengan tujuan untuk mencapai sasaran organisasi dengan cara berdaya guna dan berhasil guna. Fungsi-fungsi manajemen yang harus dilakukan adalah fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pengendalian serta fungsi pengawasan. Semua fungsi ini harus dilakukan agar perusahaan dapat mengoptimalkan semua sumberdaya yang ada dalam perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.

Manajemen keuangan dapat diartikan pula sebagai seluruh aktivitas atau kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan upaya untuk mendapatkan dana perusahaan dengan meminimalkan biaya serta upaya penggunaan dan pengalokasian dana tersebut secara efektif dan efisien dalam memaksimalkan nilai perusahaan.

Penghambat pelaksanaan Otonomi khusus adalah kurang efektifnya koordinasi antara pemerintah pusat, Pemerintah provinsi, dan Pemerintah kabupaten/kota. Dalam beberapa hal, UU No. 21/2001 ini tidak sejalan dengan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan. Untuk menyelaraskan UU tersebut, diperlukan suatu mekanisme koordinasi yang jelas antara pusat, Pemerintah provinsi, dan Pemkab/kota. (Agustiny, 2012:11).

Selanjutnya dijelaskan Prinsip pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua dimaksudkan untuk mewujudkan percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua, dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain.

Untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan seseorang sepatutnya memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu.

Pada organisasi pemerintah Aparatur Sipil Negara merupakan perangkat kerja yang sangat menentukan keberhasilan dalam meraih tujuan dan merupakan kunci yang menentukan keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan. Dalam pemberdayaan Aparatur Sipil Negara tentunya perlu diperhatikan kebutuhan manusia sebagaimana yang dikemukakan oleh Maslow, baik kebutuhan yang bersifat materiil seperti status ekonomi, status sosial

dan kebutuhan psikologis, sebagai kebutuhan-kebutuhan tersebut akan mempengaruhi baik buruknya kinerja Aparatur Sipil Negara untuk pencapaian tujuan program organisasi.

Aparatur Sipil Negara tidak dapat dipertahankan hanya sebagai alat dan perangkat kerja, namun Aparatur Sipil Negara adalah manusia yang kepribadiannya dan perilakunya banyak dipengaruhi oleh faktor psikologis baik internal maupun eksternal. Kehidupan suatu organisasi secara mendasar adalah sangat ditentukan oleh adanya manusia dan segenap sumber dayanya. Manusialah yang dapat menggerakkan suatu organisasi dengan menghubungkan segenap tenaga, pikiran, bakat, kreativitas dan berupaya demi keberlangsungan kehidupan organisasi tersebut. Manusia adalah sumber daya yang memiliki nilai tertinggi bagi setiap organisasi, karena dapat memberikan manfaat yang besar sekali bila penggunaan tenaga manusia secara tepat guna. Sumber daya manusia yang dimiliki organisasi memiliki berbagai karakteristik, termasuk kemampuan kerja, motivasi dan kinerja yang dimilikinya. Ketiga komponen tersebut sangat berkaitan dan berada dalam diri Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas sehari-hari.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja seorang anggota organisasi adalah:

1. Faktor kemampuan, secara umum kemampuan ini terbagi menjadi 2 yaitu kemampuan potensi (*IQ*) dan kemampuan *reality* (*knowledge* dan *skill*).
2. Faktor motivasi, motivasi terbentuk dari sikap Aparatur Sipil Negara dalam menghadapi situasi kerja. Motivasi seharusnya terbentuk dari awal (*by plan*), bukan karena keterpaksaan atau ketbetulan (*by accident*).

Menurut Robbins (2000) *ability* (kemampuan, kecakapan, ketangkasan, bakat, kesanggupan) merupakan tenaga (daya kekuatan) untuk melakukan suatu perbuatan. Kemampuan bisa merupakan kesanggupan bawaan sejak lahir, atau merupakan hasil latihan atau praktek. Kemampuan manusia juga dapat ditingkatkan dengan memberikan motivasi yang tepat. Motivasi kerja diperlukan sebagai salah satu indikator kinerja Aparatur Sipil Negara. Aparatur Sipil Negara dengan motivasi kerja yang tinggi dapat diharapkan menghasilkan kinerja yang maksimal. Untuk menjaga kelangsungan operasional organisasi, seorang

pemimpin harus memperhatikan serta berusaha mempengaruhi dan mendorong Aparatur Sipil Negaranya. Pemberian motivasi dengan tepat akan dapat mendorong bawahan bersemangat dalam melaksanakan pekerjaannya, sehingga menghasilkan sesuatu yang lebih baik.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan pada era otonomi khusus di Provinsi Papua dan Papua Barat adalah setelah 12 tahun berjalan, otonomi khusus (Otonomi khusus) Papua dan Papua Barat masih menghadapi sejumlah masalah yang memerlukan pembenahan antara lain pengelolaan dana ini masih banyak mengundang tanda tanya, dalam hal efektifitas dan efisiensi (Hasan, 2010:11, John, 2012: 16). Sehingga jika dana otonomi khusus Papua ditujukan sebagai jawaban atas ketertinggalan Papua, secara umum, pembangunan di Papua masih tertinggal dibandingkan daerah-daerah lain.

Manfaat

Penelitian ini secara praktis memberikan kontribusi kepada aparat pemerintah selaku pengelola keuangan di provinsi Papua dan Papua Barat bahwa efektifitas dan efisiensi keuangan merupakan makna utama dalam pengelolaan keuangan.

Secara teoritis memberikan kontribusi kepada teori keuangan bahwa Efektifitas dan Efisiensi Keuangan merupakan pengembangan ilmu keuangan, secara khusus keuangan publik.

METODE

Pendekatan kualitatif dengan perpektif weber digunakan dalam menjawab permasalahan penelitian. Alasan penggunaan pendekatan kualitatif adalah budaya masyarakat papua secara umum lebih mengedepankan persoalan sosial. Dalam pengelolaan keuangan juga lebih banyak memperhatikan aspek sosial (Bapeda Prov Papua, 2010:3). Aspek-aspek sosial inilah yang memberikan fenomena tentang pengelolaan keuangan. Weber (1960:3) memberikan pemahaman dalam mengungkap masalah sosial dengan menggunakan aspek fenomenologi untuk mengungkap gejala-gejala sosial yang terjadi.

Dengan wawancara mendalam kepada *key informan* dan *focus group discussion*, peneliti

berusaha mengungkap dan memberikan makna pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien.

HASIL

Key Informan dalam penelitian ini masih terlibat secara aktif pelaksanaan pengelolaan keuangan dan program pendidikan selama otonomi khusus berjalan.

Key Informan mempunyai waktu yang cukup untuk memberikan informasi atau kesempatan untuk diwawancarai. Informan adalah pemerintah selaku pengelola anggaran pemerintah daerah. *Key Informan* penelitian ini menjelaskan makna pengelolaan Otonomi Khusus di Provinsi Papua dan Papua Barat:

Diperoleh makna dari para *Key Informan* sebagai berikut: “Perkembangan dana otonomi khusus dari tahun 2002 s/d tahun 2015 selalu meningkat, tetapi gejala sosial dan kritik terhadap pengelolaan dana otonomi khusus oleh Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat selalu menjadi sorotan tajam dan cenderung dikatakan gagal”.

Fenomenologi dikemukakan Weber (1944) memberikan pernyataan bahwa fenomenologi terkait dengan konsep tindakan rasional dengan menganalisis makna-makna yang terdapat di balik tindakan-tindakan perorangan yang mendorong terwujudnya gejala-gejala sosial tersebut, serta mengungkap mengapa masyarakat mengatakan bahwa pengelolaan dana otonomi khusus gagal.

Pernyataan para *Key Informan* selanjutnya diperoleh makna: “Alokasi dana Otonomi khusus untuk pemberdayaan ekonomi rakyat sangat kecil dan jumlahnya menurun hingga tahun 2010, Masyarakat kurang mendapat perhatian dan belum tersedianya perangkat aturan yang memproteksi Orang Asli Papua agar memiliki akses di pasar rakyat, Koperasi di kampung belum optimal dalam peningkatan keterampilan mengelola hasil usaha dan pemasarannya.

Masyarakat belum dapat menikmati dana Otonomi khusus yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar, karena Pemerintah masih mengutamakan pembangunan di kota dibanding di kampung-kampung dan pulau-pulau. Ada ketimpangan yang mencolok antara kota dan kampung, padahal sebagian terbesar penduduk ada di kampung-kampung”.

Dalam wawancara dengan *key informan*, diberikan rekomendasi untuk menggali informasi

pengelolaan dana otonomi khusus kepada lembaga swadaya masyarakat yang sangat kritis mengawasi jalannya otsus. Hasil wawancara dengan lembaga tersebut diperoleh makna:

Pernyataan Informan: “Secara umum banyak kekecewaan masyarakat yang kian meluas dalam pelaksanaan Otonomi khusus, oleh karena; (1) alokasi dana yang sangat terbatas tidak mengimbangi harapan masyarakat yang tinggi; (2) beberapa bidang pembangunan menunjukkan kinerja yang tidak memadai karena ketidakjelasan sumber dana yang digunakan, terjadinya kebocoran dan tidak tepat sasaran.

Terjadinya *resistensi* di masyarakat terhadap implementasi Otonomi khusus, karena implementasi Otonomi khusus di berbagai bidang prioritas tidak nampak secara jelas, tidak berdampak nyata dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, dan infrastruktur dasar, Otonomi khusus sudah 12 tahun berjalan tetapi tidak ada hasil yang menonjol, masih ada keraguan masyarakat bahwa Dana otonomi khusus tidak meningkatkan kesejahteraan secara signifikan.

Dari Pernyataan-pernyataan informan dapat diperoleh preposisi sebagai berikut:

Preposisi “Pengelolaan Dana Otonomi Khusus di Provinsi Papua dan Papua Barat belum memberikan dampak perkembangan signifikan kepada kesejahteraan”.

(Moleong, 2002:32) Menjelaskan dalam penelitian kualitatif peneliti diberikan pendekatan *focus group discussion* guna mengungkap masalah-masalah sosial yang terjadi di Masyarakat. Maka dalam mengkaji lebih mendalam dan memperoleh pemahaman untuk mengungkap permasalahan penelitian, *Focus Group Discussion* dilakukan dalam penelitian.

Focus Group Discussion dihadiri oleh

1. Key Informan,
2. Lembaga Swadaya Masyarakat dan
3. Seorang Pakar Akademisi yg ahli di bidang Otsus.
4. Moderator dari seorang dosen tetap perguruan tinggi di Jayapura.

Focus Group Discussion berlangsung kurang lebih 50 menit dan diperoleh sebuah Rekomendasi adalah sebagai berikut:

Text Rekomendasi *Focus Group Discussion*:

Text Rekomendasi Pertama: “Pengelolaan dana otonomi khusus secara efektif dan efisien diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada pengelola dana yaitu Aparatur Pemerintah untuk Mengelola Dana Otsus”.

Text Rekomendasi Kedua: “Pengelola Dana Otsus dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat untuk kembali menekankan dan memahami lebih dalam teori dan undang-undang Efektifitas dan Efisiensi keuangan”.

Maka dari hasil *Focus Group Discussion* diperoleh preposisi kedua adalah sebagai berikut:

Preposisi kedua: “Mempelajari dan memahami kembali teori dan undang-undang efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan publik perlu dilakukan oleh aparaturnya pengelolaan dana otsus di pemerintah provinsi”.

PEMBAHASAN

Pengelolaan keuangan sesuai dengan regulasi akan tercapai efektifitas dan efisiensi dalam pencapaian program. Dana otonomi khusus yang diberikan di Papua memiliki makna *afirmatif action* di mana dana tersebut digunakan untuk mendukung percepatan ketertinggalan masyarakat asli Papua untuk sama dengan provinsi lainnya. Pengetahuan tentang makna *afirmatif action* harus dipahami oleh pengelola keuangan, pemahaman *afirmatif action* sangat perlu karena pengelolaan dana otsus berbeda dengan pengelolaan keuangan otonomi daerah sehingga diperlukan manajemen keuangan secara khusus, dengan mekanisme perencanaan keuangan strategis sesuai amanat otsus (anggaran pendidikan), Pelaksanaan program harus sesuai dengan prioritas, Pelaporan penggunaan dana otsus harus sesuai dengan dana yang telah disediakan dan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dana otsus agar sesuai dengan amanat undang-undang. Fungsi pengawasan pengelolaan dana otonomi khusus dapat diketahui kepatuhan pengelolaan keuangan di provinsi Papua sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan pengawasan yang ketat dan kepatuhan mekanisme pengelolaan keuangan sesuai dengan regulasi otsus diharapkan tercapainya efektifitas dan

efisiensi maksimal, sehingga pengelola dana otsus dalam memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja keuangan kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban dapat diterima dengan baik. Guna tercapai kinerja keuangan yang maksimal, implementasi kinerja keuangan otonomi khusus harus dilakukan dan menjadi budaya kerja dalam pengelolaan keuangan dengan tujuan akuntabilitas keuangan. Dengan implementasi kepatuhan dan pengawasan fungsi-fungsi manajemen keuangan akan tercapai *Value for Money* (Efektifitas, Efisiensi dan Ekonomis)

Pengelolaan dan Otsus adalah keinginan masyarakat kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat menjalankan prinsip kepatuhan, pengawasan, pertanggungjawaban dana otonomi khusus yang sesuai dengan amanat Otsus. Selanjutnya Prinsip-prinsip tersebut mencuat ke permukaan dikarenakan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana otsus setiap tahunnya menunjukkan akuntabilitas yang berpihak kepada pemerintah provinsi Papua, bukan berpihak kepada program-program prioritas dan masyarakat.

Fenomena Efektifitas dan Efisiensi mencuat di masyarakat dikarenakan laporan pertanggungjawaban yang dipublikasikan seringkali berbeda dengan perencanaan dan pelaksanaan. Apalagi program-program yang direncanakan tidak memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat. (Weber, 1944:2) mengartikan fenomenologi sebagai studi tentang tindakan sosial antar hubungan sosial. Di mana

Pemerintah provinsi Papua sebagai aktor utama pemegang kendali otonomi khusus karena mendapatkan Kewenangan sesuai dengan UU Otsus No 21 Tahun 2001. Maka wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai sasaran pembangunan, maka fenomena ini membentuk Pemerintah Papua untuk memberikan akuntabilitas kepada masyarakat. Selanjutnya sebagai hubungan social maka Masyarakat sebagai sasaran pembangunan dapat menjadi aktor utama untuk memperoleh informasi dan manfaat dari pengelolaan Dana Otsus. Peran masyarakat sebagai aktor utama dalam pengelolaan dana otsus adalah dengan memahami dengan benar sejauhmana efektifitas dan efisiensi pengelolaan dana otsus.

Dari preposisi diperoleh beberapa makna-makna tema penelitian yang disajikan pada tabel *coding* di tabel 1.

Dari *coding* makna-makna tema penelitian diperoleh Proposisi Mayor sebagai berikut:

“Aparatur pengelolaan dana otonomi khusus yang mampu memahami teori dan undang-undang efektifitas dan efisiensi dana otsus, diharapkan mampu mengelola dana otsus sesuai dengan program dan dana yang diberikan. Dengan memahami Efektifitas dan Efisiensi maka pembangunan ekonomi dan kesejahteraan dapat dikerjakan dengan dana dan waktu yang tepat”

Dari Proposisi Mayor tersebut maka langkah berikutnya adalah:

Pertama: mengkaji analisis fenomenologi weber. Dimana gejala sosial yang terjadi dimasyarakat yang

Tabel 1. Coding Makna Tema-tema

Tema Utama	Makna-Makna Tema	Kelompok Tema
Keuangan	Ada dana otonomi khusus yang begitu besar.	Pengelolaan Keuangan
Dana Alokasi Khusus	Ada sejumlah dana yang diberikan untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan.	Program Pengembangan
Efektifitas	Ada sejumlah program yang dilaksanakan guna peningkatan ekonomi dan kesejahteraan	Program pembangunan
Efisiensi	Ada sejumlah dana yang diberikan pada bidang-bidang khusus	Waktu uang
Aparatur yang memahami Otsus	Ada aparatur yang khusus memahami pengelolaan dana otsus	Pegawai

kurang percaya dengan pemerintah daerah dalam mengelola dana otsus maka dengan memasukkan kajian Proposisi Mayor tersebut maka gejolak masyarakat dapat dikurangi.

Kedua: Dengan mengkaji antara tema-tema dan proposisi mayor dengan teori keuangan maka diperoleh Kajian pada tabel 2.

Tabel 2. Kajian Proposisi dan Teori Keuangan

Proposisi Mayor	Teori Keuangan
Aparatur pengelolaan dana otonomi khusus yang mampu memahami teori dan undang-undang efektifitas dan efisiensi dana otsus, diharapkan mampu mengelola dana otsus sesuai dengan program dan dana yang diberikan. Dengan memahami Efektifitas dan Efisiensi maka pembangunan ekonomi dan kesejahteraan dapat dikerjakan dengan dana dan waktu yang tepat	Kadmasasmita (2007: 9) dan Mardiasmo (2007: 29) menjelaskan untuk Lebih Menerapkan Konsep <i>efektifitas dan efisiensi dan</i> perataan keuangan Negara menerapkan konsep <i>value for money</i> atau yang lebih dikenal dengan konsep 3 E (Ekonomi, Efisien, dan Efektif).

Maka dari kajian-kajian fenomenologi dan didasarkan secara teoritis maka ditemukan Proposisi minor sebagai berikut:

“Dana Otonomi Khusus yang sudah berjalan selama 14 Tahun diperlukan pemahaman tentang kajian efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan secara mendalam dengan kajian teori dan undang-undang, guna pelaksanaan program-program otsus secara proporsional dan profesional”.

Hasil penelitian mendukung berbagai teori dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya pada bidang yang terkait dengan penelitian ini. Beberapa teori dan penelitian pada bidang manajemen keuangan menyatakan tingkat pencapaian hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau peraturan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Pada penelitian ini peraturan perundang-undangan otonomi khusus yang mengatur keuangan pada akhirnya membentuk mekanisme pengelolaan dana otonomi khusus. Pencapaian hasil kerja dari dana otonomi khusus diharapkan memperoleh prestasi kerja

yang baik yaitu hasil yang efektif, efisien dan memberikan manfaat yang besar pada masyarakat. Prestasi kerja tersebut harus dilaporkan kepada berbagai pihak sehingga membentuk Akuntabilitas pengelolaan dana otonomi khusus.

Ditemukan bahwa pengelolaan keuangan yang Efektif dan Efisien dapat meningkatkan terhadap

peningkatan kinerja pengelolaan keuangan di provinsi Papua Barat dan Papua. Artinya jika pengelolaan keuangan dilakukan dengan efektif dan efisien oleh Aparatur Sipil negara memberikan semangat kerja sehingga dapat meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara semakin lebih baik ke depannya.

Selanjutnya, menunjukkan mampu memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan ekonomi pada provinsi Papua Barat dan Papua. Hal ini mengindikasikan bahwa meningkatnya sektor ekonomi yang tinggi, akan dapat memberikan suatu dorongan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur yang lebih baik.

Ditemukan juga bahwa dengan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien dapat memberikan semangat kerja bagi Aparatur Sipil Negara sehingga mampu melaksanakan tugasnya dengan baik pula.

Implikasi

Implikasi Praktis dari proposisi jika diterapkan pada pelaksanaan dan pengelolaan Keuangan maka diharapkan pembangunan Pendidikan, Kesehatan,

infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada Provinsi Papua dan Papua Barat lebih baik.

Sedangkan implikasi teoritis dari hasil penelitian ini adalah menekan pada teori efektifitas dan efisiensi aparat sipil negara terhadap pengelolaan keuangan.

Keterbatasan

Key Informan penelitian ini adalah Kepala Bappeda dan Dispenda Provinsi Papua dan Papua Barat. Kedua kepala pemerintahan ini adalah Pemimpin tingkat puncak (*Top Manager*) yang sudah lama bekerja di bidang keuangan dan pengelolaan dana Otsus. Oleh karena level pemimpin puncak yang mengerjakan tugas pokok dan fungsi sebatas pimpinan startegis sedangkan Pengelolaan dana otsus banyak dikerjakan oleh Manager Tingkat Bawah (*low manager*) maka kajian-kajian penelitian ini tidak menyentuh pemimpin tingkat bawah. Di mana ketidakefektifan dan ketidakefisienan banyak muncul pada level Pemimpin Tingkat Bawah.

Maka penelitian ini memberikan usulan penelitian yang akan datang untuk meneliti pengelolaan dana otsus dari pemimpi tingkat bawah (*low manager*).

KESIMPULAN

Dengan pengawasan yang ketat dan kepatuhan mekanisme pengelolaan keuangan sesuai dengan regulasi otsus diharapkan tercapainya efektifitas dan efisiensi maksimal, sehingga pengelola dana otsus dalam memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja keuangan kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban dapat diterima dengan baik. Maka guna tercapai kinerja keuangan yang maksimal, implementasi kinerja keuangan otonomi khusus harus dilakukan dan menjadi budaya kerja dalam pengelolaan keuangan dengan tujuan akuntabilitas keuangan.

Saran

Pemerintah provinsi Papua dan Papua Barat memberikan pemahaman tentang efektifitas dan efisiensi baik secara teori dan undang-undang kepada aparat pemerintah sehingga dapat menjalankan pengelolaan dana dengan baik.

Menjalankan fungsi-fungsi manajemen keuangan pada setiap program-program yang didanai dengan dana otsus.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul, H. 2008. *Manajemen Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah*. Hal 61. Yogyakarta: Penerbit Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.
- Agutinus, J. 2012. Kajian Fenomenologi Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Sektor Pendidikan Pada Provinsi Papua. Disertasi. 2012. Hal 25 -230.
- Akbar, S. 2010. *Pembangunan Daerah di Tanah Papua, Tinjauan Pengalaman dan Penerapan Paradigma Pembangunan*. © LP2SP FISIP UNCEN.
- Abdullah, editor. 1979. *Agama, Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi*. Jakarta: LP3ES.
- Bappeda Provinsi Papua, 2009. *Laporan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua Tahun 2008*. Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. Jayapura
- Hasan, Abdul. 2010. Akuntansi, Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Publik. *Jurnal Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Vol 1, Hal 5*.
- Jumingan. 2009. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Kadmasasmita, Achmad Djuaeni. 2009. *Akuntabilitas Keuangan Negara: Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: STIALAN
- Mardiasmo. 2006. Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan. Vol. 2, No. 1, Mei 2006, Hal 1-17*.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah: Ed. II*. Hal 65. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset.
- Mardiasmo. 2001. Pengawasan, Pengendalian, dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti, Jakarta, Edisi Agustus*.
- Mulyadi. 1997. *Akuntansi Manajemen: Konsep, manfaat dan rekayasa*. (Edisi kedua). Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Moleong, Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Penerbit PT Remaja Rosdakarya Bandung, Hal 32.
- Setyanto, Budi. 2009. *Menganalisa APBD Menuju Pemerintahan Papua yang Bersih* © ICS Papua. Penerbit INSIST Press Yogyakarta.

- Supoyo, Maryono. 2006. Studi Sistem Monitoring dan Evaluasi dalam Rangka Desentralisasi pada Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. Disertasi. PDIM FE UB.
- Undang-Undang RI, Nomor 21. 2001. *Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.*
- Weber, Max. 1960. *Sekte-sekte Protestan dan Semangat Kapitalisme dalam Taufik.*